



Kajian Serial Refleksi Hari Pendidikan 2025

MEMBACA ARAH PENDIDIKAN NASIONAL

Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh: Muda Bicara ID

 mudabicara.id

  [@mudabicaraid](https://www.instagram.com/mudabicaraid)

 [Muda Bicara ID](https://www.youtube.com/MudaBicaraID)

Kajian Serial Refleksi Hari Pendidikan 2025

Membaca Arah Pendidikan Nasional: Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045



Pengarah:

- Muhammad Iqbal Khatami
- Moch Edward Trias Pahlevi
- Azka Abdi Amrurobbi

Peneliti:

- Muhammad Taufik Ridho
- Astri Kusmarianti

Editor dan Kurator:

- Muhammad Iqbal Khatami
- Muhammad Hima El Muntaha

Penyuntingan dan Tata Letak: Muda Bicara ID

www.mudabicara.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ringkasan Eksekutif

Pendidikan adalah pondasi kemajuan bangsa, seperti yang terlihat di negara maju seperti Jepang dan Singapura yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM). Di Indonesia, meskipun telah terjadi peningkatan akses pendidikan, tantangan besar tetap ada, seperti ketimpangan kualitas pendidikan, perubahan kurikulum yang sering, dan biaya pendidikan yang semakin tinggi. Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan pendidikan sebagai pilar utama peningkatan daya saing SDM, namun masalah pemerataan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, masih menjadi pekerjaan rumah. Kurikulum pendidikan Indonesia, yang terus-menerus berganti, sering kali tidak diikuti dengan persiapan matang, seperti pelatihan guru yang memadai dan penguatan infrastruktur, yang menyebabkan gangguan dalam proses pembelajaran.

komersialisasi pendidikan, yang semakin kuat sejak diberlakukannya UU Sisdiknas 2003, telah menjadikan pendidikan tinggi sebagai komoditas yang lebih mengutamakan keuntungan daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Biaya pendidikan yang tinggi, khususnya di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH), semakin membebani masyarakat dan memperburuk ketimpangan akses.

Rekomendasi untuk perbaikan mencakup regulasi ketat untuk PTN BH agar biaya kuliah lebih terjangkau, serta penyusunan kurikulum yang lebih stabil dan berbasis evaluasi nyata. Selain itu, penguatan pendidikan di daerah tertinggal dan peningkatan keterjangkauan pendidikan melalui subsidi serta beasiswa untuk keluarga kurang mampu juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

01. Pendahuluan: Perjalanan dan Tantangan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah fondasi kemajuan suatu bangsa. Negara maju seperti Jepang dan Singapura menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam strategi pembangunan sumber daya manusia. Jepang berinvestasi besar dalam pendidikan pasca Perang Dunia II, sedangkan Singapura, meskipun kecil, membangun ekosistem pendidikan yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial. Pemikiran Ibnu Khaldun menganggap pendidikan sebagai alat untuk membentuk masyarakat maju dan berbudaya (Siregar, 1999).

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan pendidikan sebagai pilar utama peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM). Pada 2024, ada 53,32 juta peserta didik di 448.367 satuan pendidikan, dengan angka partisipasi sekolah yang tinggi. Namun, **pemerataan akses masih menjadi tantangan, terutama di daerah tertinggal dan kelompok rentan.**

Kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi masalah. Pergantian kurikulum yang seringkali dipicu oleh perubahan kepemimpinan mengakibatkan arah pendidikan nasional tidak konsisten. Selain itu, ketimpangan akses pendidikan tinggi terlihat jelas, dengan lebih banyak PTS dibandingkan PTN, yang menyebabkan biaya pendidikan tinggi mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu.

Komersialisasi pendidikan, yang semakin kuat sejak UU Sisdiknas 2003 dan kebijakan PTN BH, menambah beban biaya pendidikan. Di Yogyakarta, misalnya, biaya kuliah rata-rata mencapai Rp21,1 juta per tahun, sementara UMP hanya Rp2,26 juta. Hal ini menyebabkan banyak keluarga tidak mampu mengakses pendidikan tinggi, dan orientasi perguruan tinggi yang semakin komersial mengurangi integritas akademik serta fungsi pendidikan sebagai laboratorium ilmu pengetahuan.

02. Kurikulum Pendidikan Nasional: Navigasi Menuju Indonesia Emas yang Terus Dibongkar Pasang

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sering digambarkan dengan istilah "bongkar pasang," mencerminkan ketidakpastian yang muncul akibat perubahan kurikulum yang terus-menerus.

Sejak reformasi 1998, meskipun Indonesia telah mengganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sektor pendidikan belum mengalami kepastian arah.

Salah satu buktinya adalah perubahan kurikulum yang terjadi empat kali dalam dua dekade terakhir, sering kali dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan di tingkat presiden maupun kementerian. Berikut adalah daftar perubahan kurikulum yang diterapkan di Indonesia:



Nama Kurikulum	Fokus Kurikulum	Tahun
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	Fokus pada pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Menekankan pencapaian kompetensi siswa secara individual maupun klasikal.	2004
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	Memberikan otonomi lebih pada sekolah dan guru untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan. Menekankan pembelajaran kontekstual dan pengembangan karakter siswa.	2006
Kurikulum 2013 (K13)	Fokus pada pembentukan karakter, keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Menekankan pendekatan tematik terpadu dan penilaian autentik.	2013
Kurikulum Merdeka	Menekankan pembelajaran intrakurikuler dan memberikan fleksibilitas bagi guru untuk memilih perangkat pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.	2022

Perubahan kurikulum sejatinya perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus dinamis. Namun, **perubahan ini harus diiringi dengan perbaikan infrastruktur pendidikan, kesiapan tenaga pengajar, dan pemerataan akses pendidikan bagi semua kalangan.**

Setiap perubahan kurikulum harapannya dapat berbasis evaluasi dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga pelaksanaannya sering tidak diikuti dengan persiapan matang, pelatihan guru yang memadai, maupun penguatan sarana-prasarana. Sehingga, **transisi kurikulum seharusnya tidak mengganggu kontinuitas pembelajaran dan menurunkan efektivitas pendidikan**

03.

Komersialisasi dan Privatisasi Pendidikan di Indonesia

Komersialisasi dan privatisasi pendidikan di Indonesia terkait erat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, beberapa pasal dalam UU ini membuka celah bagi praktik komersialisasi pendidikan, menjadikannya sebagai komoditas semata. Berikut penjelasan mengenai pasal-pasal yang memicu hal ini:

Pasal	Isi Pasal	Keterangan
Pasal 46 ayat (1)	Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.	Pasal ini menimbulkan polemik karena negara dianggap abai terhadap tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan gratis, sementara biaya pendidikan justru dibebankan pada masyarakat.
Pasal 50 ayat (6)	Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.	Memberikan keleluasaan pada perguruan tinggi untuk menetapkan biaya masuk yang semakin mahal.
Pasal 53 ayat (1)	Penyediaan pendidikan formal oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.	Memungkinkan perguruan tinggi untuk bertransformasi menjadi badan hukum, yang dapat menyebabkan mereka beroperasi seperti korporasi.

Di Yogyakarta misalnya, yang dikenal sebagai "kota pelajar," tingginya biaya pendidikan menyebabkan banyak masyarakat setempat tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi



- Secara demografis, dari total penduduk Yogyakarta sekitar 3,68 juta jiwa (Juni 2021), hanya sekitar 11,68% yang berpendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Tingkat partisipasi pendidikan tinggi ini relatif rendah mengingat Yogyakarta dikenal sebagai "kota pelajar".
- Rata-rata biaya kuliah di Yogyakarta mencapai Rp21,1 juta per tahun, sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2025 hanya Rp2,26 juta per bulan (DIY, 2024). Dengan total pendapatan tahunan sekitar Rp27 juta, biaya kuliah yang tinggi menjadi tidak terjangkau, terutama mengingat kebutuhan hidup lainnya

Yogyakarta merupakan contoh konkret ketimpangan akses pendidikan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia akibat kebijakan yang memberikan kebebasan pengelolaan perguruan tinggi tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

04.

Menyorot Perguruan Tinggi: Kebijakan Ugal-Ugalan PTN BH yang Perlu Segera Dievaluasi

Keputusan pemerintah yang memberikan kebebasan pada Perguruan Tinggi melalui status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) telah mengubah kampus menjadi ladang bisnis, alih-alih lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan ilmu

Dilema PTN BH

- Perguruan tinggi berlomba-lomba mengejar status "world class university," namun ironisnya, langkah ini justru membebani mahasiswa dengan biaya kuliah yang terus meningkat. Untuk meraih gelar tersebut, banyak kampus sibuk membangun fasilitas yang tidak relevan dengan substansi pendidikan, seperti hotel di beberapa kampus, yang menimbulkan pertanyaan tentang keterkaitannya dengan kepentingan korporasi.
- Kebijakan PTN BH ini mengubah orientasi perguruan tinggi menjadi seperti perusahaan korporasi, di mana riset tidak lagi bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah sosial, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekonomi.



1. Dampak PTN BH Terhadap Kenaikan UKT

- PTN BH memiliki kewenangan penuh menentukan biaya kuliah. Di Universitas Indonesia (UI), UKT untuk program Sarjana tahun 2024/2025 mencapai Rp14–20 juta per tahun untuk kelompok 5, dan Rp7,5–15 juta untuk kelompok 3.
- Di Universitas Gadjah Mada (UGM), UKT juga mencapai belasan juta rupiah, termasuk untuk jalur reguler.

2. Akses Pendidikan Terhambat

- Otonomi keuangan PTN BH menyebabkan kenaikan biaya pendidikan yang menghalangi akses bagi mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah.
- Data BPS 2024 menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Indonesia hanya 39,37%, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, mencerminkan dampak buruk kebijakan PTN BH terhadap akses pendidikan tinggi

3. Komersialisasi Pendidikan

- PTN BH didorong untuk mengejar indikator kinerja yang berorientasi pada finansial, kerja sama industri, dan reputasi global, sehingga program studi yang laku di pasar lebih diutamakan. Ini mengabaikan inklusivitas dan pengembangan masyarakat, serta mendorong riset komersial yang memperlebar kesenjangan sosial.

4. Dampak Pada PTS

- Dominasi PTN BH yang didukung kekuatan finansial semakin memperketat persaingan dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTS yang mengandalkan jumlah mahasiswa sebagai pendanaan utama berisiko tergeser, menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang tidak sehat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN (1/2)

Penyusunan Kurikulum yang Stabil dan Berkelanjutan

- Pemerintah harus memastikan bahwa perubahan kurikulum didasarkan pada evaluasi yang matang dan kebutuhan nyata di lapangan, serta didukung dengan persiapan yang memadai seperti pelatihan guru dan penguatan sarana-prasarana.
- Salah satu inisiatif yang dapat diusung adalah Penerapan big data pendidikan untuk memetakan kesenjangan implementasi kurikulum di 514 kabupaten/kota

Regulasi Ketat PTN BH untuk Cegah Komersialisasi

- Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap aksesibilitas pendidikan, melalui kebijakan berikut:
 - Pembentukan Badan Pengawas UKT Nasional yang menetapkan batas maksimal biaya kuliah berdasarkan analisis UMP
 - Alokasi 25% kursi PTN BH untuk mahasiswa kurang mampu dengan skema full scholarship, mengacu pada APK pendidikan tinggi 39,37% yang masih rendah
 - Penghapusan insentif finansial bagi PTN BH yang mengutamakan kerja sama industri daripada riset sosial-kemanusiaan

Peningkatan Keterjangkauan Pendidikan Melalui Subsidi dan Program Akses

- Untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah perlu memperkuat program subsidi pendidikan, termasuk beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan kelas menengah.
- Selain itu, pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih besar, terutama untuk pendidikan tinggi, perlu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara PTN dan PTS.

REKOMENDASI KEBIJAKAN (2/2)

Penguatan Pendidikan di Daerah Tertinggal dan 3T

- Agar visi Indonesia Emas 2045 tercapai, pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas utama. Program wajib belajar 13 tahun harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal.
- Pengembangan infrastruktur pendidikan, pelatihan tenaga pengajar, dan penguatan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal harus diprioritaskan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan antar daerah.

Kesejahteraan Guru Honorer

- Sekitar 30% guru honorer saat ini menerima pendapatan di bawah Upah Minimum Regional (UMR)
- Pemerintah perlu memperluas dan mempercepat program sertifikasi guru honorer untuk meningkatkan tunjangan profesi mereka menjadi Rp2 juta per bulan mulai 2025, dengan target 600 ribu guru honorer tersertifikasi sesuai dengan janji kebijakan yang telah disampaikan Presiden Prabowo

Dukungan Kebijakan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

- Pada tahun 2024, sekitar 84 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia terancam ditutup karena tidak mampu memenuhi standar akreditasi, kekurangan mahasiswa baru, kekurangan dosen, dan masalah pendanaan, mencerminkan tantangan serius dalam keberlanjutan dan kualitas pendidikan tinggi swasta di tanah air.
- Penambahan kuota dan timeline penerimaan mahasiswa baru PTN yang lebih longgar pada 2025 menyebabkan PTS kewalahan mencari mahasiswa, memperketat persaingan dan mengancam keberlanjutan pendidikan tinggi swasta.
- Salah satu solusi adalah dengan memberikan insentif bagi PTS yang fokus pada pendidikan berkualitas dan inklusif. Pemerintah dapat menyediakan dana bantuan atau subsidi untuk PTS yang berfokus pada akses pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah, agar mereka dapat bersaing secara sehat dengan PTN.

Referensi

- Annur, C. M. (2023). Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia Capai 3.107 Unit pada 2022, Mayoritas dari Swasta. Databoks.Katadata.Co.Id.
[https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/311cd2ed2d65506/jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia-capai-3107-unit-pada-2022-mayoritas-dari-swasta#:~:text=Mayoritas atau 2.982 unit perguruan,perguruan tinggi negeri \(PTN\).](https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/311cd2ed2d65506/jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia-capai-3107-unit-pada-2022-mayoritas-dari-swasta#:~:text=Mayoritas atau 2.982 unit perguruan,perguruan tinggi negeri (PTN).)
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Pendidikan Indonesia 2024. Jakarta: BPS
- DIY, P. (2024). DIY Tetapkan UMP 2025 naik 6,5%. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/diy-tetapkan-ump-2025-naik-65>
- Hakim, I. A. (2023). Biaya Kuliah Yogyakarta Disebut Termahal di Indonesia, Ini 10 Provinsi dengan Biaya Kuliah Terbesar. Kompas.Tv.
<https://www.kompas.tv/pendidikan/427072/biaya-kuliah-yogyakarta-disebut-termahal-di-indonesia-ini-10-provinsi-dengan-biaya-kuliah-terbesar#:~:text=YOGYAKARTA%2C KOMPAS.TV - Daerah,biaya kuliah tertinggi di Indonesia.>
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). (2024). Data Perguruan Tinggi Swasta Terancam Tutup. Jakarta: LLDIKTI.
- PPN/Bappenas, K. (2025). RPJPN 2025-2045. Kementerian PPN/Bappenas.
<https://indonesia2045.go.id/>
- Project Multatuli & Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS). (2023). Survei biaya pendidikan dan dampaknya terhadap mahasiswa di Yogyakarta.
- Siregar, D. M. (1999). Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun (H. el Jaid (ed.)). Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Pustaka Pelajar.

Kajian Serial Refleksi Hari Pendidikan 2025

MEMBACA ARAH PENDIDIKAN NASIONAL

Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045

